

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Pembangunan Jakarta International Stadium (JIS) merepresentasikan kompleksitas antara pembangunan infrastruktur kota dengan dinamika sosial masyarakat urban. Konflik yang terjadi tidak hanya menyentuh aspek fisik penggusuran, tetapi juga melibatkan dimensi yang lebih mendalam terkait identitas kultural, keberlangsungan ekonomi, dan hak-hak dasar warga kota, terutama terkait penggusuran warga Kampung Bayam. Analisis terhadap tahapan konflik mengungkapkan bagaimana ketegangan yang awalnya muncul dari ketidakjelasan sosialisasi dan perencanaan berkembang menjadi krisis sosial yang berkepanjangan. Situasi ini diperparah oleh warisan kebijakan informal era krisis moneter 1997-1998, di mana ketiadaan Perda khusus yang mengatur penempatan warga di lahan pemerintah menciptakan *grey area* dalam status kepemilikan lahan.

Perkembangan konflik dari tahap pra-konflik hingga pasca-konflik menunjukkan adanya kegagalan dalam mengelola aspirasi dan kepentingan warga. Ketegangan yang dimulai dari sosialisasi awal yang tidak memadai berkembang menjadi konfrontasi terbuka ketika warga, dengan dukungan JRMK Jakarta, mengetahui perubahan fungsi KSB menjadi HPPO JIS. Puncak krisis ditandai dengan 11 bulan warga bertahan di tenda biru, menghadapi kondisi hidup yang memprihatinkan tanpa akses memadai terhadap kebutuhan dasar. Meskipun

intensitas konflik menurun setelah penawaran relokasi ke Rusun Nagrak, ketidakpuasan warga tetap tinggi karena solusi tersebut tidak mempertimbangkan aspek sosial-ekonomi komunitas.

Analisis konflik mengungkapkan bahwa pendekatan pembangunan struktural-hirarkis yang diterapkan dalam proyek JIS gagal mengakomodasi kompleksitas sosial yang terbentuk selama lebih dari dua dekade pasca krisis moneter. Perubahan fungsi KSB menjadi HPPO JIS mencerminkan bagaimana kepentingan pembangunan infrastruktur mengabaikan aspek keadilan sosial dan hak-hak warga. Fase pasca-konflik menunjukkan bahwa meskipun konfrontasi fisik berkurang, dampak sosial, ekonomi, dan psikologis dari penggusuran tetap membekas, dengan potensi konflik yang dapat kembali muncul jika aspirasi warga terus diabaikan.

Dalam upaya membangun kepercayaan kembali kepada warga, diperlukan reformasi sistemik dalam tata kelola pembangunan kota. Hal ini mencakup: Pengembangan mekanisme konsultasi publik yang lebih efektif dan bermakna; Penyusunan kebijakan relokasi yang mempertimbangkan aspek keberlanjutan sosial-ekonomi; Penguatan sistem monitoring dan evaluasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan; Penciptaan platform dialog yang memungkinkan pertukaran gagasan dan negosiasi yang setara; dan Pengembangan model kompensasi yang tidak hanya bersifat finansial tetapi juga mempertimbangkan pemulihan mata pencaharian.

Lebih lanjut, konflik ini juga menggarisbawahi pentingnya pendekatan berbasis hak asasi manusia dalam pembangunan kota. Penggusuran dan relokasi

tidak dapat dilihat semata-mata sebagai proses administratif, melainkan harus dipahami sebagai isu yang menyangkut martabat dan hak-hak dasar warga. Oleh karena itu, setiap kebijakan pembangunan harus memastikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak tersebut.

Prospek ke depan dalam persoalan yang sama membutuhkan transformasi paradigma dalam perencanaan kota. Pembangunan infrastruktur harus diselaraskan dengan prinsip-prinsip keadilan sosial dan keberlanjutan. Hal ini mencakup pengembangan model partisipasi yang lebih demokratis, sistem kompensasi yang lebih adil, dan mekanisme penyelesaian konflik yang lebih efektif. Dengan pendekatan yang komprehensif dan humanis seperti ini, pembangunan kota dapat benar-benar mencerminkan kepentingan seluruh warganya dan tidak menimbulkan resistensi dari pihak yang mengalami dampak pengusuran akibat pengembangan infrastruktur perkotaan.

## 4.2 Saran

Berangkat dari kompleksitas konflik yang terjadi antara Pemprov DKI Jakarta dan PT. Jakarta Propertindo (Jakpro), dengan warga Kampung Bayam akibat penggusuran implikasi dari pembangunan Kawasan Olahraga Terpadu Jakarta International Stadium (JIS), PT. Jakarta Propertindo (Jakpro) perlu melakukan peningkatan signifikan dalam hal transparansi pelaksanaan *Resettlement Action Plan* (RAP). Hal ini dapat dicapai melalui keterbukaan informasi yang menyeluruh mengenai kriteria penerima manfaat serta mekanisme implementasi program yang jelas. Sosialisasi oleh Jakpro harus dilaksanakan secara konsisten dengan menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh semua lapisan masyarakat, sehingga dapat mendorong partisipasi aktif dari warga terdampak.

Dalam aspek komunikasi, pemerintah dan pengelola proyek harus mengembangkan pendekatan yang lebih empatik untuk menjembatani berbagai perbedaan pandangan dengan warga. Pelibatan fasilitator independen menjadi langkah strategis untuk meminimalisir potensi konflik dan membangun dialog yang konstruktif antara semua pihak yang terlibat. Pendekatan ini akan membantu menciptakan atmosfer kepercayaan dan pemahaman bersama.

Terkait dengan relokasi warga eks-Kampung Bayam yang saat ini menempati Rusun Nagrak, perlu dilakukan optimalisasi melalui penyediaan infrastruktur pendukung yang komprehensif. Hal ini mencakup pengembangan akses transportasi yang memadai dan penciptaan peluang kerja di sekitar lokasi untuk menjamin keberlangsungan hidup warga.

Diperlukan adanya pembentukan tim mediasi independen sebagai langkah jangka panjang pemerintah dalam mendukung upaya penuntasan relokasi warga terdampak pembangunan JIS. Tim ini sebaiknya terdiri dari berbagai elemen termasuk perwakilan warga, akademisi, dan organisasi non-pemerintah. Peran utama tim ini adalah memantau proses negosiasi dan memastikan implementasi kebijakan relokasi berjalan secara adil dan transparan. Keberadaan tim independen ini akan memberikan jaminan objektivitas dalam proses pengambilan keputusan.

PT. Jakarta Propertindo (Jakpro) selaku pengelola JIS yang bersinggungan langsung dalam penuntasan relokasi warga Kampung Bayam, perlu menerapkan sistem evaluasi dan pengawasan berkala terhadap dampak sosial-ekonomi dari proses relokasi. Hasil evaluasi ini harus digunakan sebagai dasar untuk melakukan penyesuaian kebijakan agar lebih responsif terhadap kebutuhan warga. Monitoring yang konsisten akan membantu mengidentifikasi dan mengatasi berbagai permasalahan yang muncul selama proses relokasi.

Penguatan jaringan sosial menjadi aspek vital dalam proses relokasi warga eks-Kampung Bayam, dimana organisasi seperti Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) memiliki peran strategis dalam memberikan pendampingan komprehensif. Peran JRMK tidak hanya terbatas pada edukasi mengenai hak-hak warga, tetapi juga mencakup advokasi aktif dalam memperjuangkan solusi yang berkeadilan bagi seluruh pihak yang terdampak. Organisasi ini dapat bertindak sebagai jembatan komunikasi antara warga dengan pemerintah dan pengembang,

sekaligus menjadi pengawas independen yang memastikan proses relokasi berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan sosial.

Oleh karena itu, kerja sama yang terjalin antara jaringan sosial, warga, dan pemangku kepentingan lainnya dapat menciptakan ekosistem yang mendukung terlaksananya proses relokasi yang transparan, adil, dan berkelanjutan. Hal ini pada akhirnya akan membantu meminimalisir potensi konflik sosial dan memastikan bahwa pembangunan kota dapat berjalan seiring dengan terpenuhinya hak-hak dasar warga yang terdampak.